

## Peran BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang Terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Kota Tanjungpinang

**Aditya Wahyu Saputra**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Email: [haditiaadit020@gmail.com](mailto:haditiaadit020@gmail.com)

**Panji Al Falah**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Email: [rensky1903@gmail.com](mailto:rensky1903@gmail.com)

**Mellyana Candra**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Email: [Mellyana1001@gmail.com](mailto:Mellyana1001@gmail.com)

**Abstract.** *BPJS (Social Security Administering Agency) in Law No. 24 of 2011 is a legal entity established to administer social security programs. BPJS aims to realize the provision of guarantees for the fulfillment of the basic needs of a decent life for each participant and/or their family members. The purpose of this research is to find out the role of BPJS Employment in Tanjungpinang City and analyze the influence of the role of BPJS Employment on the workforce, whether it is in accordance with the objectives of BPJS Employment. The method used by the author in this research is literature study, namely data collection techniques by reading, writing and analyzing the data obtained. In this research, it was found that the important role of Tanjungpinang City BPJS Employment was in carrying out programs from the center which were then further developed. Such as the work accident insurance program (JKK) which was developed into a work accident service center (PLKK) in collaboration with the Navy Hospital.*

**Keywords:** *BPJS, Employment, Role*

**Abstrak.** BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dalam Undang-Undang No 24 tahun 2011 adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang dan menganalisa pengaruh peran BPJS Ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja apakah sudah sesuai dengan semestinya dengan tujuan dari BPJS Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi literatur yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca, menulis, dan melakukan analisa terhadap data yang diperoleh. Dalam penelitian ini ditemukan peran penting BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang dalam menjalankan program-program dari pusat yang lalu dikembangkan lagi. Seperti program jaminan kecelakaan kerja (JKK) yang dikembangkan menjadi pusat pelayanan kecelakaan kerja (PLKK) yang bekerja sama dengan Rumahsakit Angkatan Laut.

**Keyword:** BPJS, Ketenagakerjaan, Peran

### PENDAHULUAN

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dalam Undang-Undang No 24 tahun 2011 adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional

berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disingkat BPJS ini dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosialnya berdasarkan prinsip gotongroyong, nirbala, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepersertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mendefinisikan jaminan sosial itu adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran berserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Jaminan sosial merupakan suatu kebijakan yang memberikan pelayanan dan perlindungan dalam mensejahterakan masyarakat. Menurut Purwoko jaminan sosial (jamsos) merupakan salah satu faktor yang bermanfaat dalam memudahkan masyarakat dari segi perekonomian. Jaminan sosial bentuk pembayaran yang diterima pekerja dalam hal diluar kesalahannya tidak melakukan tugasnya, sehingga menjamin kepastian pendapatan *income security* apabila pekerja kehilangan upahnya karena alasan diluar keinginannya (Soepomo dalam Abdullah, 2018).

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dijelaskan tentang Jaminan sosial tersebut pada pasal 28H ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Oleh karena itu Jaminan Sosial atau disingkat Jamsos ini merupakan perkara yang sangat penting bagi suatu negara dalam meningkatkan kualitas hidup warga negara.

Menurut Husni (2014), Jaminan Sosial tenaga kerja merupakan sebuah bentuk kewaspadaan pemerintah dalam melindungi tenaga kerja dalam bentuk bantuan berupa uang untuk mengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja seperti kecelakaan dalam bekerja, sakit, hami, hari tua, bahkan meninggal dunia (Pambudi, 2019).

Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan baik sebelum, selama dan setelah berakhirnya hubungan kerja, baik dalam menghasilkan barang maupun dalam bentuk pekerjaan. Dari segi hukum ketenagakerjaan, hal ini merupakan bidang hukum privat yang mempunyai aspek publik, karena walaupun hubungan kerja tercipta atas

dasar kebebasan para pihak, namun masih ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemerintah (Syahrial, 2020).

Tenaga kerja berbeda halnya dengan ketenagakerjaan, tenaga kerja merupakan sebuah istilah untuk seorang individu yang aktif dalam angkatan kerja tertentu. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam ekonomi suatu negara, dan produktivitas tenaga kerja dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja merupakan pihak yang aktivitasnya dimanfaatkan baik dari segi pemikiran maupun tenaga. Oleh karena itu, dalam hal ini pemberian penghargaan atau jaminan terhadap kinerja pegawai atau tenaga kerja sangat diperlukan. Adapun tenagakerja itu meliputi pegawai negeri, pegawai formal, pegawai informal, dan pengangguran (Aksin, 2018).

BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang adalah sebuah badan yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan Jaminan Sosial (Jamsos) Ketenagakerjaan melalui beberapa program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Lokasi gedung BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang ini terletak di Jl. Engku Putri.

BPJS Ketenagakerjaan ini menerapkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai berbasis strategi untuk memberikan arahan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan tujuan organisasi (Suhendra, 2020)

## TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti sangat diperlukan dalam melakukan suatu penelitian.

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tentang</b>
Regina Supeno Desie M.D Warouw Herry Mulyono	2016	Peran Komunikasi BPJS Kepada Pelaku Usaha Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. ditemukan masih banyak lembaga usaha yang belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan baik pegawai maupun karyawannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang bertujuan menunjukkan kondisi dan peristiwa.
Dwi Elisa Army	2017	“Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Peserta Jaminan Sosial Dari Sektor Perusahaan Di Kota Padang”. Membahas jaminan sosial yang

		diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah program pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. Dalam memberi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja dan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan peserta jaminan sosial dari sektor perusahaan di kota Padang, Mengetahui tindakan BPJS Ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang tidak mendaftar BPJS Ketenagakerjaan, dan Untuk mengetahui Kendala Perusahaan tidak mendaftarkan diri sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Sutrisno	2022	“Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagi Karyawan”. Penelitian ini menjelaskan ditemukan bahwa pekerja pada saat bekerja sering diabaikan terhadap perlindungannya, yang menyebabkan perlindungan terhadap tenaga kerja ini bermaksud untuk melindungi hak dasar pekerja dan menjamin kesetaraan perlakuan tanpa deskriminasi dengan alasan apapun demi mewujudkan kesejahteraan para pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja; dan untuk mengetahui dan menganalisa tanggungjawab dari BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

Jadi, dari tinjauan pustaka diatas dapat ditemukan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan. Persamaan dari kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas peran dari BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan Perbedaannya yaitu dari aspek yang diberikan jaminan yaitu antara Karyawan dan Sektor Perusahaan di Kota Padang. Sedangkan penelitian ini berfokus pada jaminan sosial tenaga kerja di Kota Tanjungpinang.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan studi literatur atau studi pustaka. Metode ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan mengenai teknik

mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, serta melakukan analisa terhadap sebuah data.

Selanjutnya yaitu pengumpulan data, data yang digunakan dalam artikel ini adalah Journal, Artikel Ilmiah, dan E-book yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Terakhir yaitu melakukan analisa terhadap data yang telah dikumpulkan dengan mulai dari membaca abstrak dari sebuah jurnal dan artikel ilmiah dan melihat apakah sumber tersebut sesuai dengan topik yang dibahas lalu mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dalam penelitian dan membuat kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang ini merupakan badan yang gedungnya terletak di Jalan Engku Putri Nomor 3 Tanjungpinang Timur. Gedung BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang ini berada dikawasan KM 4 untuk akses menuju gedung tersebut sangatlah mudah.

BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang sangat berperan penting dalam penjaminan sosial bagi masyarakat di Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan harus teliti dan serius dalam menjalankan program-program yang telah ada dan dikembangkan semaksimal mungkin.

BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang memiliki Program Jaminan Kematian (PJK) dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang sudah berjasa dalam mengantisipasi sebanyak 1.008 PTT Pemko Tanjungpinang. Jaminan sosial ketenagakerjaan ini tidak bersifat menyeluruh baik ASN maupun non-ASN memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh BPJS Kota Tanjungpinang telah memberikan bantuan kematian kepada dua orang PTT (pegawai tidak tetap) pada tahun 2022 yang meninggal dunia telah diberikan bantuan uang sebesar Rp42Jt – 48Jt serta untuk ahli waris kuliah yang diberikan beasiswa sebesar 12Jt sampai lulus kuliah.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Tanjungpinang mengatakan bahwa “Program dari BPJS ini sudah sampai pada level kelembagaan di desa, RT/RW, dan Posyandu.” Sunjana sebagai Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang mengatakan untuk provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dari total 940.000 pekerja di Kepri, hanya 52% atau 440.000 pekerja yang telah diawasi atau diantisipasi Oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dalam memperluas jaringan program tersebut hingga tingkat Desa dan RT/RW ada tiga tahap yang telah dilakukan yaitu pertama, BPJS Ketenagakerjaan akan meningkatkan kolaborasi dengan mitra, meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, asosiasi

pengusaha, buruh, serta komunitas informal. Kedua yaitu melakukan pemeriksaan pasokan perusahaan besar. Ketiga, yaitu memberikan fasilitas pendaftaran dan pembayaran yang mudah. (Warta, 2023)

Kepala bidang pelayanan BPJS Ketenagakerjaan mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menjalankan lima program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ini juga menyediakan tambahan layanan dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) yang berupa fasilitas pembiayaan perumahan. Dalam pembiayaan perumahan yang diberikan terbagi menjadi dua macam yaitu bagi tenaga kerja dan perusahaan, bagi tenaga kerja akan diberikan manfaat layanan seperti kredit kepemilikan rumah (KPR), pinjaman uang muka perumahan (PUPM), dan pinjaman renovasi perumahan (PRP). Sementara perusahaan, akan diberikan manfaat layanan yaitu kredit konstruksi KK/KPPP. Layanan ini bertujuan agar mempermudah dan memberi kepastian kepada peserta dalam memiliki rumah dan juga mendukung pemerintah akan berhasil dalam program sejuta rumah.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang ini bekerja sama dengan Rumahsakit Angkatan Laut sebagai pusat layanan kecelakaan kerja (PLKK). Pusat layanan kecelakaan kerja (PLKK) ini adalah fasilitas atau bentuk layanan yang diterima para peserta BPJS Ketenagakerjaan dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), berbentuk pelayanan kesehatan yang diberikan pada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Program ini tentunya memberikan manfaat bagi peserta berupa pelayanan kesehatan seperti perawatan dan pengobatan secara gratis.

Jaminan sosial ini merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kotler (2011) dalam Lestari (2018) pelayanan adalah cakupan kegiatan atau kegiatan yang bisa diberikan kepada pihak lain atau pelayanan ini tidak mempengaruhi hak milik seseorang. Dalam proses pelayanan ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi kualitas dari pelayanan seperti kepemimpinan, kemampuan dan ketrampilan, serta organisasi. (Mansur, 2008).

### **Kepemimpinan**

Kepemimpinan merupakan bagian utama dari kegiatan dalam menganalisis proses dan dinamika organisasi, karena banyak penelitian dan perdebatan yang membahas tentang definisi kepemimpinan. Menurut Sweeny dan McFarlin (2002) dalam Wibowo (2011) kepemimpinan itu melibatkan serangkaian proses pengaruh interpersonal. Prosesnya bertujuan untuk memotivasi bawahan, menciptakan visi untuk masa depan dan mengembangkan strategi

untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan jaminan sosial.

### **Kemampuan Dan Ketrampilan**

Kemampuan dan ketrampilan ini merupakan dua hal yang dianggap penting dalam mengembangkan diri. Kemampuan ini merujuk pada potensi yang dimiliki seseorang secara alami dalam melakukan suatu tindakan demi mencapai tujuan, sedangkan ketrampilan adalah keahlian yang dapat diperoleh dengan cara latihan dan pengalaman. Kemampuan dan ketrampilan para penyedia layanan jaminan sosial dapat secara signifikan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Kemampuan dalam memahami aturan dan kebijakan jaminan sosial serta ketrampilan berkomunikasi dengan peserta dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan.

### **Organisasi**

Menurut Mills (2000) dalam Prima (2020) organisasi merupakan sekelompok manusia yang berkepentingan yang setiap tindakannya selalu di kontrol demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi ini merupakan startegi yang besar diciptakan oleh sekumpulan orang untuk mencapai berbagai tujuan yang membutuhkan usaha dari beberapa orang. Organisasi mempengaruhi pelayanan karena pelayanan jaminan sosial dapat meningkatkan efektivitas layanan tersebut.

## **KESIMPULAN**

BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang merupakan badan yang

1. BPJS Ketenagakerjaan memiliki lima program yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
2. BPJS Ketenagakerja Kota Tanjungpinang sangat berperan penting dalam mewujudkan jaminan ketenagakerjaan dikota Tanjungpinang dari program-program yang telah ada dari pusat dan dikembangkan lagi dikota Tanjungpinang seperti hasil dari kerjasama dengan Rumahsakit Angkatan Laut yaitu Program Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK).
3. BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang mengembangkan layanan dari program jaminan hari tua yaitu berupa pembiayaan perumahan.
4. Dalam proses pelayanan ada beberapa fator yang mempengaruhi yaitu dari segi kepemimpinan, kemampuan dan ketrampilan, dan Organisasi.

## SARAN

1. BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang harus selalu memperhatikan apa saja jaminan yang dibutuhkan oleh tenagakerja di Kota Tanjungpinang.
2. BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang harus memastikan ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh peserta dan melakukan sosialisasi atau penyuluhan lebih lanjut tentang program baik yang akan dijalankan maupun yang akan dikembangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2.
- Aksin, N. (2018). UPAH DAN TENAGA KERJA (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam). *Jurnal Meta*, 73.
- Indonesia, P. (2011). UU RI No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3.
- Indonesia, P. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Lestari, F. A. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN.
- Mansur, T. (2008). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA BAGIAN BINA SOSIAL SETDAKO LHOKSEUMAWE. 20.
- Maryam, N. S. (2016). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK. *JURNAL ILMU POLITIK DAN KOMUNIKASI*, 7.
- P, P. U. (2020). *Perilaku Organisasi*. UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun .
- Pambudi, L. S. (2019). PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI WILAYAH KOTA SEMARANG DITINJAU DARI PERMENAKER NOMOR 1 TAHUN 2016. 209.
- Pemprop. (2023). Gubernur Ansar Serahkan Anugrah Paritrana Award 2022 Provinsi Kepri.
- RUMKITAL Dr. MIDYATO SURATANI SIAP MELAYANI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI KEPRI. (2018).
- Suhendra, E. P. (2020). Analisis masa kerja dan promosi terhadap kinerja karyawan BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Nusantara*, 33.

Syahrial. (2020). DAMPAK COVI-19 TERHADAP TENAGA KERJA DI INDONESIA.  
*Junral Ners.*

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Warta. (2023). BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang Perluas Cakupan Layanan Hingga RT/RW.